



Mahein Nia Lian no. 19, 28 Abril 2011.

Potensi Ancaman Keamanan Menjelang Pemilu 2012

Latar Belakang

Selama musim pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif, publik Timor-Leste tidak jarang harus menyaksikan adegan saling melukai dan saling membunuh di antara para pendukung partai politik, perusakan gedung-gedung pemerintahan, pembakaran rumah-rumah warga dan berbagai bentuk anarki lainnya.

Sebagaimana yang terjadi pada pemilihan 2007 yang lalu di Distrik Baucau, Vikeke, Dili dan Ermera. Pemilihan merupakan arena kontestasi demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk jejaring sosial, kultural, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik pemilihan umum.

Sehingga persoalan seperti hasil penghitungan suara yang menjadi persoalan fatal, dapat diselesaikan secara politik tak memadamkan konflik pemilu secara otomatis. Sebab, setelah proses penyelesaian selesai tidak dibarengi dengan sosialisasi terhadap para simpatisan oleh elit partai. Akibatnya, dinamika konflik pemilu sering kali meruncing menjadi konflik kekerasan.

Dengan demikian menurut Fundasaun Mahein (FM) perlu melakukan suatu antisipasi dari berbagai elemen bangsa agar dapat menghindari konflik yang sama di pemilihan mendatang. FM dalam mencermati situasi menjelang Pemilu 2012, berbagai indikasi yang cukup signifikan menyatakan bahwa terdapat ancaman yang sangat serius dalam proses demokratisasi di Timor- Leste.

Indikasi-indikasi tersebut bukanlah suatu hal yang berlebihan, melainkan suatu realitas objektif dalam proses kematangan demokrasi yang sedang bergulir. Pengalaman Pemilu 2007 diyakini oleh sebagian besar masyarakat bangsa Timor-Leste sebagai pemilihan yang banyak menimbulkan kerusuhan yang telah menelan korban jiwa dalam masyarakat.

Situasi sosial dan keamanan menjelang pemilihan umum legislatif di Timor-Leste kemungkinan akan menuai krisis yang cukup serius bagi bangsa ini. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan perencanaan yang cukup guna mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut diatas.

Berkaca dari pelaksanaan pemilihan persiden dan pemilihan legislatif tahu 2007 lalu, Pemilihan presiden dan pemilihan Legislatif meski banyak orang melihat tidak serawan pemilihan umum

2007, akan tetapi tetap menyimpan suatu permasalahan yang akan dapat meledak sewaktu-waktu.

Karena masih adanya kelompok-kelompok histeris yang memperkeruh situasi damai di Timor-Leste selama ini, siapa pelaku di balik tindak kejahatan itu serta bisakah tercipta pemilu yang aman, damai, demokrasi tahun depan? pertanyaan cerdas untuk dilontarkan kepada semua pihak, sebab, masyarakat sudah sangat jera dan tidak ingin terulang kembali traumatik jilid kedua dinegara ini.

Sehingga pran partai politik dalam mewujudkan pemilu yang damai sangat diperlukan menjelang pemilu maupun sesudah pemilu mengingat saat ini banyak terjadi konflik di berbagai tempat yang meresahkan masyarakat dan Partai Politik (Parpol), bagaimana komitmen peserta Partai Politik untuk menjadikan pesta demokrasi secara damai, tanpa intimidasi?

FM Nia Lian No. 18 kali ini akan menjelaskan kepada publik bagaimanapun situasi keamanan nasional menjelang pemilu, saat pemilu maupun sesudah pemilu serta kelompok dan aktor yang turut bermain dalam mengistabelitkan keamanan nasional Timor-Leste. FM juga membuat kesimpulan serta merekomendasikan kepada pemerintah dan pihak terkait agar mengantisipasi ancaman konflik yang dapat terjadi menjelang pemilu, saat pemilu maupun sesudah pemilu.

Partai Politik dalam mewujudkan pemilu Damai

Komitmen partai politik untuk mewujudkan pemilihan yang damai dan demokratis sudah dimulai sejak pemilihan umum 2001. Saat itu sekitar 14 partai politik secara sukarela melakukan penandatanganan dan sepakat untuk tidak melakukan kekerasan dalam pemilu di lapangan demokrasi (dulu lapangan Pramuka)¹. Namun konflik tetap saja terjadi di pemilihan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa partai politik yang berada di Timor-Leste memiliki potensi besar untuk melakukan konflik setiap kali ada pemilu.

Berkaitan dengan hal itu Presiden PUN (Partidu Unidade Nasional/Partai Persatuan Nasional) menyatakan bahwa, prang partai politik dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai sangat penting yaitu Partai politik mesti menghormati dan mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam konstitusi RDTL. Lebih jauh Borges menyatakan, partai politik juga harus menghindari diri dari tindakan kekerasan yang melibatkan kelompok masyarakat,² agar konflik tidak terulang seperti pemilihan tahun lalu.

Karena konflik yang terjadi di pemilu 2007 di berbagai wilayah membawa trauma tersendiri bagi masyarakat setiap kali akan menghadapi pemilihan umum. Belum hilang dari ingatan, ketika proses kampanye partai politik dihadapkan dengan konflik antara simpatisan partai tertentu yang mengikuti kampanye. Diantaranya adalah kasus penembakan yang dilakukan oleh Oknum PNTL terhadap Afonau Kudalai pengawal pribadi partai CNRT untuk Xanana yang menyebabkan Kudalai tewas. Pembunuhan itu terjadi saat Partai CNRT (Congresso Nacional Recusturasaun Timor Leste) sedang melakukan kampanye di Distrik Viqueque.

¹ TLALVA, Nota Informasaun, Violensia Armada Iha Timor Leste, No. 3 Juni 2009.

² Wawancara dengan Presiden PUN (Partidu Unidade Nasional/Partai Persatuan Nasional) di Parlemen Nasional di Dili, 28 Februari 2011.

Konflik semakin memuncak ketika hasil pemilihan umum legislatif diumumkan partai Fretilin sebagai pemenang pemilu namun gagal dalam membentuk pemerintahan karena tidak mendapatkan kursi mayoritas di Parlemen Nasional. Sehingga Presiden Republik Jose Ramos Horta menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk AMP (Aliansi Mayoritas Parlemen) antara lain Partai CNRT, Partai Demokrasi (PD), Partai Sosial Demokrasi (PSD), Asosiasi social Demokrasi Timor Leste (ASDT) untuk dapat membentuk pemerintahan baru.

Keputusan yang diambil oleh PR Jose Ramos Horta menyebabkan simpatisan/masa dari partai pemenang pemilu tidak menerima dan selanjutnya mereka melakukan aksi kekerasan terhadap penduduk yang diduga menjadi pendukung partai lain. Kekerasan yang terjadi setelah pemilihan banyak terjadi di wilayah Baucau, Viqueque, Lospalos, Ermera dan Dili. Kekerasan meliputi pembakaran rumah warga dan perkantoran, juga terjadi kekerasan fisik seperti penyerangan terhadap kelompok partai lain, pelemparan batu, pemukulan serta pembunuhan.

Pemilihan tahun 2001 dan 2007 menjadikan pelajaran besar bagi bangsa untuk menghindari persolan yang sama dimasa depan. Konflik yang sama akan terulang bila elit politik di negara ini hanya mengutamakan kepentingan tertentu. Menurut Wakil Presiden Partai Fretilin, Arseino Bano bahwa, yang dapat menyebabkan konflik bagi partai Fretilin adalah mereka yang kalah dalam pemilihan, tidak mau menerima kealahannya, tentu saja hal semacam ini dapat saja menimbulkan instabilitas karena yang menang menjadi kalah lalu yang kalah menjadi menang.³

Sedangkan Fernanda Borges menjelaskan partai politik sudah semestinya memberikan pendidikan politik terhadap para simpatisan partai politik agar menghormati proses demokrasi yang terjadi.⁴ Hal senada disampaikan oleh Renan Selak wakil partai UNDERTIM (Unidade Nasional Demokrata Rezistencia Timorensis) bahwa, masing-masing partai sudah semestinya memberikan pembelajaran kepada simpatisan agar mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh partai.⁵

Rui Vianan Direktur HAK menilai bahwa, sangat penting diberikannya pendidikan kewarga negaraan terhadap para pemilih sejak dini. Meski pun pendidikan kewarganegaraan sudah dilakukan oleh NGOs Nasional, NGOs Internasional, UN dan pemerintah sejak tahun 2007 namun belum maksimal. Jadi sekarang diperluakannya perbaikan untuk mencapai suatu standar agar dapat digunakan bersama-sama untuk melakukan kampanye kewarga negaraan.⁶

Oleh karena itu untuk mewujudkan pemilihan umum yang damai dan demokratis partai politik semestinya memberikan pendidikan politik bagi masa pendukungnya untuk menghindari tindakan kekerasan dalam pertarungan politik pada 2012 nanti.

1. Konflik Internal dan Eksternal Parpol

Dalam seluruh proses pertarungan politik ini akan terjadi pertikaian internal dan eksternal antar partai politik dan antar kader dalam partai politik itu sendiri bila tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang matang. Ini kebanyakan terjadi pada elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan sesat hingga pada akhirnya menyebabkan konflik internal dalam partai politik.

³ Wawancara dengan Wakil Presiden Partai Fretilin di Comite Centra Fretilin (CCF) di Dili, Hari Rabu, 02 Maret 2011.

⁴ Wawancara dengan Presiden PUN (Partidu Unidade Nasional/Partai Persatuan Nasional) di Parlemen Nasional di Dili, 28 Februari 2011.

⁵ Wawancara dengan Renan Selak wakil Partai UNDERTIM di Parlemen Nasional, di Dili, 03 Februari 2011.

⁶ Wawancara dengan Rui Vianan Direktur Yayasan HAK, di Farol Dili, 15 Maret 2011.

Jagat politik di Tanah Air tak pernah sepi dari konflik internal partai politik. Hampir setiap waktu kita selalu menyimak berita konflik antar pengurus dalam sebuah Parpol. Satu Parpol selesai, lalu disusul parpol lain yang mengalami hal sama. Eskalasi konflik internal Parpol sangat kentara terutama setelah penyelenggaraan Pemilu 2007, khususnya pasca Parpol-Parpol menyelenggarakan kongres nasional.

Kongres II Partai Fretilin di Dili 2006 berakibat meruncingnya konflik antara kubu Mari Alkatiri dengan beberapa tokoh yang tergabung dalam Fretilin Mudansa yang dipimpin Jose Luis Guterres cs. Beberapa tokoh ini akhirnya keluar dari partai Fretilin. Kelompok Fretilin Mudansa akhirnya membentuk partai baru, dengan nama partai Fretilin Mudansan partai tersebut merubah Revolusaun menjadi Rekonstrusaun sehingga dikenal dengan Fretilin Rekonstrusaun. Juru Bicara Fretilin Rekonstrusaun Visente Maubosy sudah menyampaikannya ke publik⁷ namun hingga hari ini Fretilin Rekonstrusaun belum mendaftarkan diri sebagai partai politik di CNE untuk partisipasi dalam pemilihan umum 2012.

Hal sama dialami Partai Sosial Demkrasi (PSD). Kongres III PSD 2009 melahirkan dua kepemimpinan : Zacarias da Costa Albano vs Frenando Gusmao yang menyebabkan partai PSD juga terpecah. Pada akhirnya Frenando Gusmao menarik diri dari partai PSD lalu membentu partai PDN (Partidu Denzelvovementu Nasional/Partai Pembangunan Nasional) dan sudah terdaftar pada CNE untuk mengikuti pemilihan umum 2012 nanti.

Partai ASDT pun sempat terjadi perpecahan yaitu antara Francisco Xavier dengan Gil da Costa Alves, persoalan ini muncul ketika presiden partai Francisco Xavier menilai menteri yang berasal dari partainya telah melakukan korupsi dan ia meminta agar yang bersangkutan mundur dari posisinya sebagai menteri.

Perpecahan dalam tubuh partai politik tersebut dipastikan bakal melemahkan peran-peran partai politik sebagai pengendali konflik. Logikanya sederhana, bagaimana mungkin partai politik mampu menjadi pengendali konflik bila parpol-parpol itu gagal mengendalikan konflik dalam dirinya sendiri? Bagaimana mungkin partai politik bisa menjadi artikulator kepentingan rakyat bila mereka justru sibuk dengan dirinya sendiri?⁸

Perpecahan Parpol seperti tersebut di atas tentu saja mengundang pertanyaan bagi publik. Mampukah partai politik itu bakal mampu memainkan peran sebagai fondasi untuk mewujudkan pemilu yang damai bagi kestabilan politik di Tanah Air? Mampukah partai politik menjadi artikulator kepentingan rakyat?

Persoalan lain yang muncul juga adalah pertikaian eksternal antara partai politik menjelang pemilihan umum 2012, gejala pertikaian ini juga ikut muncul ke permukaan dengan segala bentuk manifestasinya. Hal ini dapat dilihat ketika mendekati pemilihan umum banyak anggota partai yang memilih pindah partai dan elit politik saling menyerang dengan kata-kata melalui media nasional. Seiring dengan itu, masa pendukung partai dan individu calon anggota parlemen nasional juga akan terseret dalam pertikaian, yang bisa berujung perusakan, penganiayaan dan kekerasan fisik serta upaya-upaya pihak lain yang berusaha untuk menggagalkan pemilu 2012.

⁷ Koran Diario Edisi, 08 Maret 2011.

⁸ <http://sholahuddinmz.multiply.com/journal/item/3>

Berhubung dengan itu Presiden PUN menjelaskan bahwa, setiap kali menyelenggarakan pemilihan umum di Timor Leste banyak partai politik yang tidak menyampaikan program partai namun sebaliknya hanya menjelek-jelekkan partai lain dipangun politik hingga menyebabkan para simatisan marah dan terjadi konflik.⁹

Dengan demikian pemilihan yang akan datang tetap juga diyakini berpotensi akan menghadirkan kerawanan dan ancaman, terutama jika semua pihak yang terlibat lebih menonjolkan logika "kepentingan politik" demi mencapai kepentingan kelompok dan politik pragmatis dari aspirasi politik sendiri-sendiri.

Dalam prosesnya, sejumlah gesekan antarkepentingan politik dalam pertarungan bakal muncul dan terus meningkatkan suhu politik ke depan. Bukan tidak mungkin hal itu dapat mengganggu kondisi stabilitas nasional, yang harusnya senantiasa dijaga agar kondusif, mantap, dan terkendali".

CNE¹⁰ dalam Menghadapi Pemilu

CNE (Comissao Nacional de Eleicoes/Komisi Nasional Pemilu) dalam menghadapi pemilu yang akan datang diperlukan kesiapan yang maksimal guna mewujudkan Pemilu yang damai dan demokratis. Maka CNE sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagai suatu lembaga penyelenggara, tentu banyak dibebani oleh tugas yang berat. Agar pemilu berlangsung sesuai rencana dan tepat waktu, CNE jauh hari sudah perencanaan program dan anggaran dalam jumlah tertentu, dan jadwal pemilu.

Kemudian CNE menyusun dan menetapkan tata kerja mulai dari CNE pusat, sampai CNE Distrik. Setiap tahapan pelaksanaan pemilu perlu disusun dan ditetapkan pedoman yang bersifat teknis. Lalu dikoordinasikan, diselenggarakan dan dikendalikan di setiap tahapan pelaksanaan. Mencari data pemilih sampai akhirnya menetapkan sebagai peserta pemilu.

Mengingat banyaknya partai politik yang akan mengikuti pemilihan tahun depan akan membawa persoalan tersendiri. Hingga sekarang sudah 20 partai politik yang terdaftar di CNE untuk mengikuti pemilihan umum 2012¹¹ disini dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan partai dari 16 peserta partai yang mengikuti pemilihan 2007 menjadi 20 peserta partai politik pada 2012.

CNE meloloskan 4 parpol baru sebagai peserta pemilu, menambah 16 parpol lama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2012. Dengan peserta pemilu yang sudah terdaftar di CNE tentunya akan menimbulkan kerawanan tersendiri terkait dengan pecahan partai politik yang mendirikan partai baru, ini diperlukan kontrol dan aturan yang tegas dengan demikian tidak terjadi benturan antara partai politik dalam kampanye nanti.

Begitu juga dengan kesiapan khusus dengan hasil penghitungan suara yang sangat mempengaruhi perolehan kursi di legislatif dan juga ketika pemilihan presiden? Inilah sebuah

⁹ Wawancara dengan Presiden PUN (Partidu Unidade Nasional/Partai Persatuan Nasional) di Parlemen Nasional di Dili, 28 Februari 2011.

¹⁰ La iha informasaun klean kona ba CNE tamba peskizador husi Fundasaun Mahein atu ba halo intervista ho presideinte no membru CNE sira la iha tempo no la koho halo komentariu kona ba asuntu siguransa antes elisaun. Neduni husu ba institusa nebe relefante atu kopera ho sosiadade sivil no fahe informasaun nebe kelean atu nune komunidadade tomak bele hetan informasaun no fo sira nia kontribusaun ba Timor Leste.

¹¹ Koran Timor Post Edisi, Selasa 05 April 2011.

kerawanan yang patut diantisipasi sejak dini, jika kita tidak ingin menghadapi krisis politik tahun depan.

PNTL dalam Pemilu

Pada Sabtu 26 Maret lalu UNPOL (United National police) secara formal menandatangani surat penyerahan wewenang dengan pemerintahan Timor-Leste lalu pada Minggu, 27 Maret 2011 UNPOL menyerahkan wewenang tertinggi keamanan nasional kepada PNTL, di Palacio do Governu.¹²

Dengan penyerahan mandat keamanan dari UNPOL kepada PNTL ini merupakan tanggungjawab berat yang telah diberikan kepada PNTL mengingat pemilihan umum sudah diambang pintu. Maka diperlukannya kesiapan ekstra dalam menjamin instabilitas sebelum pemilu, menjelang pemilu maupun sesudah pemilu.

Oleh karena itu PNTL mesti meningkatkan dan memelihara profesionalitas personel, dan juga untuk mengetahui sejauhmana kesiapan operasional dalam mengemban tugas pengamanan Pemilu 2012 guna terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta terselenggaranya pesta demokrasi mulai dari pemilu presiden dan pemilu legislatif.

Dalam memberikan pengamanan jalannya pemilu 2009 PNTL menurunkan seluruh personel, diperlukan tindakan aparat PNTL yang tegas dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan menunjukkan sikap humanis dan simpatik dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dibutuhkannya netralitas dalam mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh konstitusi RDTL pasal 147 ayat 1 yang berbunyi, Polisi akan membela keabsahan demokrasi dan menjamin keamanan dalam negeri bagi semua warga Negara dan akan bersifat sama sekali tidak memihak.¹³

Berkaitan dengan itu PM Xanana Gusmao meminta kepada jajaran PNTL agar tidak melibatkan diri kedalam politik untuk dapat melayani masyarakat dengan baik.¹⁴ Dalam memberikan pengamanan yang baik terhadap pelaksanaan pemilu yang damai tentu saja diperlukan netralitas dan yang tidak kalah penting juga adalah dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah guna menunjang tugas PNTL.

Sehingga pemerintah mesti memenuhi kebutuhan fasilitas dan peralatan PNTL. Berhubung dengan itu Presiden Republik Jose Ramos Horta menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah khususnya Sekretaris Negara Urusan Pertahanan Dr. Francisco Guterres yang selama ini tidak merencanakan dan memprogram guna melengkapi fasilitas PNTL. Lebih jauh Ramos Horta juga menyatakan bahwa, ia sedih dan marah ketika melihat kondisi PNTL di Distrik dan Sub-Distrik yang sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah.¹⁵

Namun minimnya fasilitas dan peralatan tidak menghambat kerja keras PNTL dalam menjamin keamanan nasional menjelang pemilihan umum 2012. Berkaitan dengan itu Eugenio Pereira menyatakan, PNTL selalu siap untuk menjamin instabilitas Negara dalam kondisi dan situasi apa pun. Lebih jauh Eugenio juga menyampaikan bahwa, PNTL juga masih kekurangan sumber

¹² Koran Diario Edisi, 28 Maret 2011.

¹³ Undang-Undang Dasar Republik Demokrasi Timor Leste, tahun 2002, halaman: 64.

¹⁴ Koran Diario Edisi, 28 Maret 2011.

¹⁵ Koran Diario Edisi, 04 Maret 2011.

daya manusia, namun PNTL tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik di pemilihan yang akan datang.¹⁶

Dengan demikian kita berharap agar pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia, netralitas serta cepat memenuhi kebutuhan peralatan dan fasilitas guna mendukung operasi PNTL agar dapat mendeteksi ancaman yang akan muncul agar PNTL dapat melakukan antisipasi dan pencegahan secara dini.

Potensi Ancaman Keamanan

Beberapa ancaman yang mungkin akan terjadi dalam pemilihan umum 2012 dan perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Konsolidasi Partai menjadi Ajan Kampanye

Meskipun kampanye belum dimulai banyak partai politik yang sudah melakukan curi start untuk lebih dulu melakukan kampanye. Di ajang konsolidasi Partai politik yang marak dilakukan oleh beberapa partai politik di berbagai Distrik, Sub-Distrik, Sucu bahkan di Aldeia di jadikan anjang untuk bersosialisasi atau berkampanye dan melakukan konvoi atau arak-arakan dengan kendaraan oleh partai politik tertentu.

Ha-hal semacam ini diperlukan perhatian serius oleh CNE namun hingga sekarang belum ada tindakan tegas dari CNE. Berkaitan dengan itu Peneliti dari Fundasaun Mahein Frei Guterres¹⁷ beberapa kali mau mewawancarai Presiden CNE namun yang bersangkutan tidak di tempat dan sibuk.

Aksi konvoi simpatisan dan pendukung partai marak terjadi dalam konsolidasi partai diberbagai daerah dinilai telah melakukan kecurangan dengan melakukan aksi mencuri start kampanye. Aksi konvoi kendaraan yang melibatkan kendaraan roda empat dan roda dua tersebut. Ini dinilai oleh FM sebagai aksi curie start sebab menurut FM masa kampanye dengan menggunakan massa di arena terbuka baru akan dimulai setelah ada kesepakatan oleh partai politik dengan CNE.

Aksi konvoi dari simpatisan dan pendukung parti juga dapat menimbulkan konflik antara masa karea pihak dari masa pendukung partai lain dapat mengambil tindakan semenan-menan ini terjadi maka konflik tidak dapat dihindari karena aksi konvoi yang dilakukan tidak mendapatkan keamanan dari pihak berwajib PNTL.

Jadi saat ini partai politika belum boleh melakukan konvoi karena termasuk kampanye terbuka, sehingga diperlukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut terhadap kecurangan yang dilakukan oleh partai yang bersangkutan serta dapat mengetahui sejauh manan kecuranga itu

¹⁶ Koran Suara Timor Lorosae Edisi, 25 Februari 2011.

¹⁷ Frei Guterres Peneliti dari Fundasaun Mahein (FM), Hari pertama Peneliti dari FM merencanakan untuk bertemu dan mewawancarai Presiden CNE namun para estaf menyatakan bahwa Presiden CNE tidak ditempat sedang mengajar di UNTL, hari berikutnya peneliti FM diberitahu bahwa Presiden CNE sedang melakukan kesiapan untuk mengikuti rapat di Parlamen Nasional sehingga ia tidak punya waktu untuk melakukan wawancara. Sedangkan pada hari berikutnya Presiden CNE tidak ditempat dan para estaf meminta no hpnya peneliti dari FM untuk menghubungi bila presiden CNE sudah ada waktu namun hingga laporan ini dipublikasi penelitik FM belum mendapatkan Informasi dari pihak CNE.

terjadi. Dengan demikian dapat diberikan sanksi oleh CNE terhadap partai politik yang dinilai nakal dan tidak mentaati atura yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Merekrut Masa oleh Partai Politik

Mendekati pemilihan umum banyak partai politik yang mendadak mengunjungi masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan alasan mereka prihatin dengan kondisi masyarakat yang semakin hari semakin buruk. Dalam kunjungan tersebut untuk merekrut masyarakat di pedesaan para elit parpol acap kali memberikan janji dan iming-iming dengan merubah keadaan mereka jika masyarakat mau menjadi anggota partainya.

Beberapa waktu yang lalu Partai Sosial Demokrasi/Partido Sosial Demokrata (PSD) membagikan sen kepada masyarakat di Distrik Suai tentu saja dengan tujuan tertentu, namun Wakil Presiden PSD, Maria Paixao menyatakan, PSD membagikan sen untuk mengganti sen lama yang sudah rusak di kantor kelurahan Zumalai, Sub-Distrik Zumalai, Distrik Covalima-Suai sebagai sumbangan.¹⁸

Sedangkan hal yang sama dilakukan oleh UDT (Unit Demokrasi Timor/União Demokrati Timor) yaitu dengan menyerahkan 101 buah kursi untuk Gereja Estasaun Missionario Datin, Same dengan alasan bahwa sejak gereja ini didirikan 32 tahun lalu hingga sekarang belum memiliki kursi untuk jemaat yang hendak melakukan ibadah.¹⁹ Partai UDT juga menyerahkan 50 sak semen kepada Gereja Nosa-Senhora Asunsaun Same untuk memperbaiki gedung yang sudah rusak.²⁰

Dengan berbagai alasan partai politik merekrut masyarakat yang berada dipedesaan untuk memberikan dukungannya. Berhubungan dengan itu Presiden PUN, Fernanda Borges menyatakan partai politik jangan suka merekrut masyarakat dengan propaganda politik tetapi lebih baik dengan program partai yang ditawarkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat.

Lebih jauh Fernanda Borges menyatakan bahwa, jika terjadi perekrutan masa atau pengklaiman oleh partai tertentu akan terjadi perebutan masa yang menyebabkan konflik yang akan mencederai proses pemilihan.²¹

3. Pengklaiman Parpol terhadap Pendukung

Menjadi fenomena menarik, jika banyak parpol mulai mengklaim memiliki pendukung lebih banyak sekarang. Pada awalnya klaim itu hanya dilakukan oleh partai oposisi (Fretilin) yang memang sebagai pemenang pemilu pada tahun 2001 maupun 2007 lalu. Sekarang, Partai CNRT juga melakukan hal yang sama. Bahkan, Fretilin Mudansa pendukung pemerintah juga mengklaim mendapatkan dukungan lebih banyak dari masyarakat.

Sekjen Partai CNRT, Deonísio Babo menyatakan, hingga sekarang masyarakat yang mendaftarkan diri secara formal untuk menjadi anggota CNRT sudah mencapai 125 ribu, angka ini masih bisa meningkat karena proses pendaftaran sampai hari ini masih berjalan terus.²²

¹⁸ Koran Suara Timor Lorosae, Edisi 04 Maret 2011.

¹⁹ <http://www.cjtitl.org/cjtitl-haleu-distritu/cjtitl-same/278-udt-oferece-kadeira-101-ba-igreja-missionario-datina-same>

²⁰ <http://www.cjtitl.org/cjtitl-haleu-distritu/cjtitl-same/277--udt-oferece-semente-saka-50-ba-parokia-same>

²¹ Wawancara dengan Presiden PUN (Partido Unidade Nasional/Partai Persatuan Nasional) di Parlemen Nasional di Dili, 28 Februari 2011.

Natalino dos Santos juga menyatakan bahwa, Fretilin Mudasa hingga saat ini sudah memiliki dukungan mencapai 70 ribu lebih. Natalino juga menjelaskan bahwa, Fretilin Mudansa telah menyelesaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Bendera partai, lagu partai dan dalam waktu yang dekat Fretilin Mudansa akan mendeklarasikan diri sebagai sebuah Partai politik.²³

Sedangkan Marí Alkatiri Sekjen Partai Fretilin menyatakan, pendukung partai Fretilin sudah mencapai 80 ribu, ini adalah angka sementara karena hingga sekaran masyarakat belum selesai mendaftarkan diri. Data ini berdasarkan atas database sekretariat pendaftaran di Komite Centra Fretilin (CCF), hal ini disampaikan Mari Alkatiri pada malam pendanaan Fretilin, Jumat, 11 Februari 2011 di Hotel Arbiru.²⁴

Namun koran Timor Post edisi hari senin, 11 April menurunkan sebuah berita yang menyatakan bahwa, pendukung partai Fretilin hingga sekaran sudah mencapai 150 ribu yang bersiap untuk menghadapi pemilihan presiden dan sekjen partai Fretilin secara langsung di kongres nasional ke tiga nanti.

Pengkaliman oleh partai politik yang menyatakan bahwa mereka sudah memiliki pendukung dari 70 ribu hingga 150 ribu akan menyebabkan persoalan ketika hasil pemilu diumumkan dan hasil tersebut berbeda dengan angka yang sudah dimiliki oleh partai politik. Sebab melihat jumlah pendukung partai politik dari 70 ribu hingga 150 ribu artinya partai-partai tersebut sudah menang diatas kertas/menang sebelum bertanding.

Dengan demikian saat hasil pemilihan dikeluarkan oleh CNE akan menyebabkan partai politik tertentu tidak menerima hasil tersebut dan keras kepala dengan alasan bahwa telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara karenan berbeda dengan data yang dimiliki oleh partai politik tersebut. Oleh karenan itu CNE mesti membuat ketentuan atau peraturan untuk tidak mempublikasi jumlah pendukung yang telah dimiliki oleh partai politik tertentu dan yang berhak mengumumkan hasil pendukung adalah CNE yaitu setelah melalui proses pemilihan umum nanti.

4. Masa Radikal

Hampir seluruh partai politik yang ada di Timor-Leste memilika kelompok radikal, Kelompok radikal adalah militan yang tidak dapat dikontrol oleh elit parpol tertentu. Masa radikal ini sangat berbahaya bila dilibatkan dalam kampanye atau proses pemilihan umum karenan kadan kala tindakan mereka membabi buta untuk menimbulkan konflik antara masa pendukung partai politik.

Sebagai masa radikal yang tak segan-segan melakukan perusakan maupun pembakaran terhadap fasilitas umum seperti perkantoran dan rumah-rumah penduduk serta bentrok fisik dengan kelompok yang dianggap tidak sepaham dengan mereka.

Masa radikal kebanyakan melibatkan diri dalam konflik secara spontan yang tidak dapat dikontrol oleh elit politik manapun, kelompok ini kebanyakan suka melibatkan diri dalam tauran antara pemuda kelompok, suka meminum minuman keras (beralkohol) maupun menggunakan

²² <http://timordobenfurak.blogspot.com/2011/03/rejistu-ba-militantescrnt-125-mil-ona.html>

²³ Koran Timor Post Edisi, Kamis, 06 April 2011.

²⁴ <http://timordobenfurak.blogspot.com/2011/03/rejistu-ba-militantescrnt-125-mil-ona.html>

narkoba. Menjadi berbahaya jika pihak ketiga melakukan profokasi saat pemilihan berlangsung dengan jelas akan terjadi perseteruan antara kelompok radikal yang sangat fatal.

Maka diperlukan kerja keras PNTL untuk mengidentifikasi berapa kelompok radikal yang melibatkan diri dalam partai politik serta mengidentifikasi juga kelompok ini kebanyakan terdapat didaerah manan saja agar PNTL dapat melakukan antisipasi secara dini untuk menekan konflik yang dapat terjadi karena uluh kelompok radikal ini.

5. Isu Ninja

Setelah dua tahun silam masyarakat dikagetkan dengan keberadaan Ninja yang muncul di daerah Suai dan Zumalai. Kini isu Ninja kembali muncul dan tentu saja dengan munculnya isu Ninja ini sangat meresahkan masyarakat luas. Anggota Parlemen Nasional Paul Martins mengakui keberadaan isu Ninja yang selama ini telah meresahkan masyarakat Timor-Leste. Hal ini disampaikan oleh Paul Martins ketika mengikuti siding di parlemen nasional.

Lebih jauh Martins juga menyatakan bahwa, situasi di Timor Leste mulai memanas dengan keberadaan kelompok Ninja yang mengancam keberadaan masyarakat dan transportasi umum yang beroperasi pada malam hari. Dalam koto Dili maupun di distrik-distrik ada sekelompok orang yang beroperasi ditengah masyarakat dengan menutupi muka hingga membuat masyarakat takut. Dan pada beberapa waktu yang lalu telah terjadi pembunuhan terhadap salah seorang pemuda yang diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal di Comoro, kelompok ini pun sering melakukan penyerangan dalam kota Dili.²⁵

Dalam kesempatan yang sama Anggota Parlemen dari fraksi partai Fretilin Josefa Pereira juga mengakui keberadaan kelompok Ninja ini dan lebih jauh ia menjelaskan bahwa, keberadaan Ninja tidak hanya muncul di Dili namun di Baucau mulai muncul kelompok Ninja dan kerap kali mereka melakukan aksinya dengan melempar mobil dan melempar orang ini terjadi pada tanggal, 5 dan 6 bulan Februari 2011 lalu.²⁶

Anggota Parlemen Paul Martis dari Komisi B yang membidangi pertahanan keamanan dan urusan luar negeri menyampaikan kepada koran Dili Post bahwa, karena eksistensi kelompok Ninja menyebabkan masyarakat tidak lagi hidup dalam ketenangan, sehingga Dia meminta kepada kementerian yang kompeten untuk cepat mengambil tindakan tegas terhadap kelompok Ninja yang kembali meresahkan masyarakat Timor-Leste.

Lebih jauh Paul Martins juga menyataka bahwa, kemungkinan besar Kelompok Ninja yang kembali melakukan aksinya masih berkaitan dengan pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif yang akan diselenggarakan pada tahun 2012 nanti.²⁷

6. Konflik antara Perguruan Bela Diri

Persoalan antara bela diri tidak pernah selesai, dari waktu-kewatu persoalan yang dihadapi semakin rumit. Dalam sejarah perseteruan antara kelompok beladiri terjadi sejak tahun 80an hingga sekarang. Melihat sejarah konflik yang begitu panjang makan akan semakin sulit konflik tersebut secepatnya hilang dari benak kelompok bela diri yang selama ini berseteru. Konflik

²⁵ Koran Diario, Edisi 09 Februari 2011.

²⁶ Koran Diario, Edisi 09 Februari 2011.

²⁷ Koran Dili Post, Edisi VI/ 22 Maret 2011/ Tinan 1.

akan semakin meluas jika kelompok beladiri ikut aktif dalam organisasi politik di Timor-Leste, namun selama ini sudah ada indikasi menuju kesana.

Banyak perguruan beladiri yang aktif dalam partai politik secara individu maupun secara organisasi hal ini dapat saja menyebabkan konflik sewaktu-waktu antara perguruan bela diri selama masa kampanye, sebelum maupun sesudah kampanye sebab dari awal kelompok perguruan bela diri ini saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Konflik akan semakin meluas karena akan melibatkan militan maupun simpatisan partai politik.

Wakil Presiden Partai Fretilin, Arseino Bano menyatakan bahwa, konflik antara kelompok bela diri yang terjadi kebanyakan tidak murni selalu ada embel-embel (kepentingan) politik tertentu yang sedang ikut bermain dalam konflik tersebut. Konflik semacam ini tidak lagi terjadi bila kekuatan politik tertentu tidak melibatkan diri lagi ke dalam kelompok bela diri.

Lebih lanjut Arseino Bano menjelaskan bahwa, jika konflik tersebut terjadi dengan kekuatan besar maka pihak berwajib PNTL mesti mengambil tindakan tegas terhadap kelompok bela diri, kalau konflik tersebut tidak dapat di atasi oleh PNTL mak pemerintah mesti melibatkan F-FDTL guna mendukung perang PNTL dalam menjaga instabilitas nasional.²⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Peneliti NGO Fundasaun Mahein Frei Guterres meminta kepada PNTL untuk mengambil tindakan tegas terhadap perguruan bela diri yang sering memicu konflik yang berakibat pada instabilitas nasional.²⁹ Dalam hal ini diperlukan kerja keras oleh pihak PNTL untuk cepat mengambil tindakan pencegahan agar persoalan yang timbul dapat diredahkan agar tidak menggancam instabilitas nasional.

7. Kriminalitas

Mendekati pemilihan umum kasus kriminalitas di Dili meningkat dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya masyarakat di kota Dili dan sekitarnya. Tiga kasus pembunuhan berturut-turut terjadi dan hingga sekarang pihak PNTL belum mengungkap apa motif dari pembunuhan itu.

Komandan Kerja Investigasi Kriminal Superintendente Xefi, Jose Soares menyatakan bahwa, setelah PNTL menerima mandat dari UNPOL (United Nations Police) kasus pembunuhan meningkat. Pada tanggal, 26 Maret 2011 lalau terjadi pembunuhan di Jalan Bidau Dili, pembunuhan itu terjadi pada malam hari yang menyebabkan seorang pemuda tewas.³⁰

Pembunuhan berikutnya terjadi pada hari jumat, 01 April minggu lalu, kejadian tersebut bermula dari perkelahian hingga terjadi pembunuhan terhadap Aanastacio da Silva. Sedangkan pembunuhan berikutnya terjadi pada tanggal, 03 April kemarin. Pembunuhan terjadi ketika korba (Silvino Baros) sedang menunggu Bus untuk berangkat ke Distrik Bobonaro.

Kasus Kriminalitas yang terjadi selama mendekati pemilihan umum diperlukan penanganan serius dari pihak PNTL untuk mengungkap dalam maupun motif pembunuhan yang terjadi. Kalau persoalan ini tidak ditangani secara serius oleh pihak berwajib makan pihak ketiga akan

²⁸ Wawancara dengan Wakil Presiden Partai Fretilin di Comite Centra Fretilin (CCF) di Dili, Hari Rabu, 02 Maret 2011.

²⁹ Koran Kroat, Edisi Rabu, 02 Maret 2011.

³⁰ Koran Suara Timor Lorosae, Edisi 05 April 2011

menggunakannya sebagai isu politik untuk menyerang pemerintah untuk menimbulkan keresahan dalam masyarakat menjelang pemilu 2012.

8. Isu UNTAS

Setelah kongres ke dua UNTAS (Unit Timor Assuwain)³¹ yang diselenggarakan di Kupang-NTT-Indonesia menjadi ramai diperbincangkan diberbagai media Nasional Timor-Leste maupun media Internasional. UNTAS menjadi perhatian publik ketiga beredarnya selebaran kertas yang menjelaskan tentang visi, misi dan tujuan UNTAS serta struktur organisasinya.

Persoalan penting mengenai selebaran ini tentang visi dan misi UNTAS yang menyatakan akan berjuang membawa kembali Timor-Leste untuk berintegrasi ke Indonesia. Persoalan lain yang muncul juga tentang daftar nama dalam struktur organisasi UNTAS yang menyebutkan anggota kabinet AMP (Aliansi Mayoritas Parlemen), anggota Parlemen Nasional serta beberapa masyarakat sipil yang terlibat dalam struktur organisasi tersebut.³²

Melihat hal itu *Konselhu Senado Estudante*³³ (KSE) UNTL (Universitas Nasional Timor Leste) melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan petisi kepada pemerintah untuk memperhatikan eksistensi UNTAS yang dapat menimbulkan Instabilitas di Timor-Leste³⁴.

Berhubung dengan itu Proklamator Independensia Francisco Xavier do Amaral pernah meminta pada seluruh masyarakat Timor-Leste untuk menghapus organisasi UNTAS yang muncul di bumi Lorosae dengan tujuan untuk mengintegrasikan Timor-Leste dengan Indonesia, karena sekarang bukan saatnya untuk saling memaafkan.³⁵

Namun PM Xanana Gusmao menyatakan bahwa, orang yang menyebarkan isu UNTAS adalah orang yang tidak memiliki hati yang bersih terhadap bangsa ini, karena sekarang kita berada pada tahun 2011 bukan lagi tahun 2000 atau 2001 yang berbicara tentang politik semacam ini. Lebih jauh Xanana juga menyatakan bahwa, ia selama ini mendengar ada orang yang memberikan pandangannya bahwa Saya (Xanana) mau membukakan pintu untuk mereka agar dapat kembali untuk memberikan suaranya kepada partai CNRT (Congresu Nasional Reconstrusao Timor Leste) di pemilihan Umum 2012 nanti.³⁶

Mengingat pemilihan umum sudah dekat persoalan UNTAS pun dengan cepat beredar dan menjadi perdebatan publik. Hal ini dapat digunakan sebagai senjata oleh elit politik tertentu untuk memojokan partai politik tertentu karena kelompok pro integrasi yang sekaran berada di Timor Leste banyak yang terlibat dalam partai politik. Kalau pemojokan itu terjadi maka dapat memicu konflik antara kelompok dalam partai yang beraliran nasionalis dengan yang lainnya.

Oleh karenan itu pihak PNTL mesti melakukan investigasi dan penyelidikan mendalam terhadap isu UNTAS yang selama ini beredar agar dapat mencegah isu UNTAS ini berlanjut

³¹ <http://fundasaunmahein.wordpress.com/2011/02/17/untas-rendefoti-lima/>

³² Koran Timor Post, Edisi Selasa, 18 Maret 2011.

³³ Ironisnya para mahasiswa yang tergabung dalam KSE terjebak dalam politik, karena belum melakukan investigasi dan menyelidiki kebenaran dari dokumen itu KSE terburu-buru melakukan aksi, sehingga mengundang reaksi keras dari mereka yang merasa dirinya telah dirugikan oleh KSE.

³⁴ Koran Timor Post, Edisi Rabu, 16 Maret 2011.

³⁵ Koran Diario Nasional, Edisi Jum`at, 16 Juli 2010.

³⁶ Koran Suara Timor Lorosae, Edisi Kamis, 17 Maret 2011.

hingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang sedang bersiap untuk menghadapi pemilihan umum mendatang.

9. Penimbunan Beras MTCI

Penimbunan beras bersubsidi selama mendekati Pemilu 2012, dapat mendorong kelangkaan dan naiknya harga beras tersebut sehingga akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu atau partai politik untuk memanfaatkan situasi. Para spekulan memanfaatkan situasi menjelang Pemilu 2012 dengan melakukan aksi penimbunan beras bersubsidi dan kemudian melepas dengan harga tinggi, sehingga mengancam stabilitas harga dan ketersediaan stok.

Hal tersebut menjadi tantangan dan menjadi pengawasan PNTL bekerja sama dengan MTCI yang harus mengawasi gerak-gerik spekulan yang biasanya `bermain` dengan menaikkan harga jauh di atas harga yang seharusnya dan berpluktuatif di kisaran harga yang relatif tinggi. Karena bagaimanapun juga, mustahil pemerintah bisa menjamin ketersediaan sembako menjelang Pemilu 2012 sepanjang spekulan masih `meraja-lela` menguasai harga pasar yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaannya.

Mendekati pemilihan umum 2012 harga beras MTCI nain hingga \$. 24 dolar AS, Semakin meningkat harga beras bersubsidi telah menyensarakan masyarakat karena masyarakat tidak mampu membeli beras tersebut. Dengan naiknya beras MTCI juga memicu kemarahan dalam masyarakat. Masyarakat pada umumnya kecewa terhadap kebijakan Menteri Industri dan Pariwisata yang tidak melakukan kontrol terhadap peredaran maupun harga di pasaran. Melihat harga beras yang semakin meningkat Parlemen Nasional marah dan meminta pemerintah cepat membuat kebijakan untuk menurunkan harga beras MTCI.

Penentangan juga datang dari berbagai kalangan, seperti politisi, kelompok masyarakat, LSM dan mahasiswa, bahkan beberapa kepala desa secara terang-terangan juga meminta kepada Presiden Republik Timor-Leste Jose Ramos Horta untuk menurunkan harga beras yang sangat mahal hingga membuat rakyat tidak lagi mampu untuk membelinya.

Karena itu peran kementerian MTCI maupun PNTL sangat dibutuhkan dalam melakukan langkah-langkah guna mengamankan kebijakan pemerintah dengan melakukan deteksi dini berbagai keresahan masyarakat terkait dengan penimbunan Beras MTCI maupun kenaikan harga beras MTCI yang berdampak pada gangguan keamanan menjelang Pemilu 2012. PNTL mesti berupaya memberantas segala bentuk penimbunan beras MTCI dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi lebih besar.

Beras MTCI maupun bahan pokok lainnya mengalami kenaikan harga yang melambung tinggi. Ini adalah satu gejala unik di Timor-Leste setiap menjelang pemilu, pasti ada saja kegoncangan di bidang ekonomi. Hal ini wajar karena menjelang pemilu, partai-partai sedang sibuk mempermainkan harga sehingga dapat keuntungan guna mendukung dana kampanye nanti.

10. Pengangguran

Tingginya angka pengangguran dapat menjadi pintu gerbang masuknya gejolak sosial, apalagi dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pemilihan umum (pemilu). Dengan jumlah pengangguran yang tinggi, besar kemungkinan dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Melihat tingkat pengangguran yang tinggi seluruh Kepala Desa di kota Dili meminta pemerintah

agar dapat membukakan lapangan pekerjaan bagi pemuda. Kepala Desa Vessoru, Caikoli Dili, Elidio Amaral menyatakan, pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran di Timor-Leste.³⁷

Meskipun jumlah pengangguran di Timor-Leste masih simpang siur namun penelitian yang pernah dilakukan oleh *Sekretaria Estadu Formasaun Profesional no Empregu* (SEFOPE) pada tahun 2009-2010, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran antara tahun 2009-2010 sudah mencapai 600 ribu.³⁸

Hal ini terjadi karenan penciptaan lapangan kerja yang tak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru, itu menyebabkan angka pengangguran terbuka meningkat. Begitu juga angka lulusan dari luar negeri maupun dalam negeri yang meningkat drastis setiap tahun bila dibandingkan dengan lapangan pekerjaan³⁹, persoalan lain adalah lulusan luar negeri dipaksa untuk mengikuti system kerja yang menggunakan bahasa Postugis dan bahasa Inggris menjadi kendala tersendiri. Hal ini akan mendorong pengangguran semakin tinggi pada tahun-tahun berikutnya dan itu berbahaya bagi Negara Timor-Leste.

Karena pengangguran dapat dengan mudah menimbulkan gejolak sosial, apalagi jika dimanfaatkan oleh vested interest. Pemilu 2012 sudah di ambang pintu dan seperti tahun-tahun sebelumnya, situasi di seputar pemilu selalu memanas. "Perang politik" antarelite politik dan juga di tingkat masa akar rumput turut memeriahkan suasana ajang ritus demokrasi kita.

Semarak Pemilu biasanya diwarnai dengan aksi mobilisasi masa yang seringkali diiringi dengan tindak anarkis. Dengan iming-iming uang dan nasi bungkus, orang yang tidak memiliki pekerjaan dapat dengan mudah terbujuk rayuan untuk melakukan pekerjaan apa pun. Kaum pengangguran dengan mudah dapat dimobilisir oleh sekelompok orang yang tak bertanggung jawab untuk kepentingan politik jangka pendek.

Kalangan pencari kerja selalu menjadi objek menarik untuk dijadikan apa pun oleh vested interest. Didukung dengan situasi yang rawan, mereka bisa menjadi 'tempat ideal' berkecambahnya bibit kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas, adalah kawan seiring tingginya pengangguran dan besarnya jumlah penduduk miskin.

Pengangguran juga menjadi kalkulasi dan katalisator pertarungan politik elite, meski realitasnya tak pernah menjawab persoalan real pengangguran. Realitas ini hanya menjadi alat bargaining, yang membuat situasi menjadi kian tak karuan. Angka pengangguran akhirnya berubah menjadi statistik politik yang menakutkan.

Dalam konteks ini, diperlukan kemauan politik serta komitmen dari pemerintah dan elite politik untuk mengantisipasi masalah ini sejak dini. Jangan sampai masyarakat terutama kaum pengangguran yang terjerembab dalam jurang kemiskinan dan tidak tahu apa-apa justru dijadikan korban untuk memenuhi hasrat politik jangka pendek. Berbagai kemungkinan akan munculnya gejolak sosial sedini mungkin harus dicegah. Jika tidak, bukan tidak mungkin dapat menimbulkan tindakan yang merugikan seperti konflik dan kerusuhan sosial.

³⁷ Koran Dili Post, Edisi IV/15 Maret 2011.

³⁸ <http://fundasaunmahein.wordpress.com/2011/04/12/dezempregu-biban-ida-kria-instabilidade-ih-timor-leste/>

³⁹ Hingga saat ini Kementerian pendidikan belum memiliki data yang pasti tentang jumlah sarjana yang lulus dari luar negeri.

11. Korupsi

Anggota parlemen nasional sering menyatakan bahwa pemerintahan ini penuh dengan korupsi bahkan Presiden Republik Jose Ramos Horta pernah menyatakan pemerintahan AMP yang dipimpin oleh PM Xanana Gusmao banyak melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan sebagai pejabat publik. Pimpinan Ombudsma, Sebastiao Ximenes juga membuat laporan yang membuat kaget masyarakat, dalam laporan tersebut PDHJ merekomendasikan beberapa nama menteri untuk di proses di pengadilan karena kasu korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kasu Jose Luis Guterres yang di duga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan memperkaya diri menambah deretan kasu korupsi dan penyalahgunaan wewenang di pemerintahan Timor-Leste. Kebanyakan yang tersangkut tindak pidana korupsi adalah anggota partai politik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Potret ini menggambarkan bahwa korupsi oleh pejabat publik tidak dapat dianggap lagi sebagai persoalan atau "musibah" yang melanda individu-individu atau oknum, melainkan sudah menjadi persoalan kelembagaan, bahkan sosial.

Sistem politik apapun, baik tirani, oligarki maupun demokrasi tidak kebal pada perilaku korup para aktor penyelenggaranya. Bahkan kenyataannya, dalam sistem demokrasi yang membutuhkan biaya tinggi seperti yang diterapkan di Timor-Leste pada hari ini, tindakan korupsi oleh pejabat publik di Pemerintahan menjadi semakin masif.

Dari motifnya, tidak dapat dikatakan bahwa korupsi yang dilakukan pejabat publik terjadi karena alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan primer. Motivasi korupsinya terjadi karena keserakahan baik untuk mendapatkan nilai lebih dari kewenangan yang dimiliki atau untuk membiayai keberlanjutan kekuasaan yang sedang dinikmati. Dalam konteks ini, korupsi dilakukan guna mempertahankan status sosial dan politik atau digunakan sebagai mesin uang partai politik guna mendukung kelancaran operasional partai politik.

Karena itu PNTL, PDHJ (Provedor Direitu Humanus no Justisa) dan KAK (Komisi Anti Korupsi) berupaya mengantisipasi terjadinya praktek korupsi pada lembaga negara yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk mendukung operasional dana partai politik menjelang Pemilu 2012.

Upaya Antisipasinya

Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) berfungsi dan tugas pokok sebagai penjaga ketertiban umum dan penegakan hukum dalam seluruh proses Pemilu 2012. Karena itu pula tugas aparat PNTL adalah mengamankan individu, masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Obyek atau sasaran tugas PNTL adalah para pelanggar hukum yang berupaya melakukan pelanggaran pemilu dan upaya pengagagalan pemilu.

Dengan fungsi, tugas, dan obyek tindakan PNTL seperti itu, keputusan dalam mengambil tindakan atas terjadinya pelanggaran hukum atau keamanan dan ketertiban masyarakat melekat pada setiap diri anggota PNTL. Sedangkang Pasal 147 ayat 2 dalam Konstitusi RDTL tahun 2002 menyatakan bahwa, Pencegahan kejahatan wajib dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia⁴⁰. Atau, dengan kata lain, seorang anggota PNTL (pemimpin PNTL di lapangan) secara prinsip dapat mengambil tindakan ketika terjadi pelanggaran hukum tanpa menunggu perintah dari atasan.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Republik Demokrasi Timor Leste, tahun 2002, halaman: 64.

Untuk itu, jajaran PNTL diberi kewenangan menggunakan alat kekuatan. Berkaitan dengan itu Komandan PNTL Longuinuhos Meonteiro menyatakan, menghadapi persoalan yang muncul selama ini PNTL selalu menghormati undang-undang, namun persoalan tersebut meningkat menjadi tindak kekerasan maka PNTL akan menghadapinya dengan kekerasan pula.⁴¹

Meskipun demikian, PNTL dengan menggunakan segala daya yang dimiliki berupaya bergerak cepat dengan sekaligus meningkatkan daya pakai kapasitas yang dimiliki jajaran PNTL untuk menghindari keterdadakan dan menghadapi ancaman upaya menggagalkan pemilu sesuai dengan fungsinya.

Wakil Presiden Partai Demokrasi (PD), Adriano Nasimento menyatakan bahwa, dalam konstitusi PNTL lah yang bertanggung jawab atas keamanan internal maka kita percaya bahwa PNTL akan memberikan keamanan secara maksimal menurut kemampuannya kalau PNTL sudah tidak mempun untuk mengatasi keamanan internal yang terjadi maka institusi F-FDTL (Falintil-Forcas Defesa Timor Leste) mesti memberikan dukungan untuk keamanan dan instabilitas masyarakat.⁴²

Sedangkan Arseino Bano menyatakan, bila terjadi kekerasan yang berdarah-darah dan semakin luas maka F-FDTL mesti dilibatkan dalam mendukung PNTL untuk melakukan penanganan secara cepat dan terkendali terhadap situasi tersebut.⁴³ F-FDTL dapat dilibatkan ketika keadan sangat berbahaya. Namun F-FDTL pada masa damai mesti tetap mendukung operasi dan tugas PNTL.

Dalam keadaan darurat institusi F-FDTL mesti dilibatkan, kasus penembakan yang dilakukan oleh Mayor Alfredo terhadap Presiden Republik Jose Ramos Horta pada tahun 2008 menjadi contoh dimanan PNTL dan F-FDTL melakukan operasi bersama dalam menghadapi kelompok Gastao Salsinha Cs yang menjadi Buronan pada saat itu. Jika pemilihan umum berjalan dengan normal maka tidak perlu melibatkan institusi F-FDTL dan itu merupakan tanggungjawab PNTL.

Jadi sekarang ini PNTL adalah lembaga yang paling diharapkan peranannya oleh semua pihak dalam menjaga seluruh proses Pemilu 2012. Karena itu, PNTL tidak ragu-ragu dalam menegakkan hukum terhadap semua bentuk pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan PNTL untuk menindaknya.

Kesimpulan

Kalau dicermati penyelenggaraan Pemilu 2012 semakin dekat, namun belum bisa dikatakan akan membaik (aman, damai, demokrasi), dimana munculnya berbagai ancaman radikal kepada masyarakat kian tak terbendung, sehingga landasan pemilu damai berkemungkinan tidak akan terwujud sebagaimana harapan semua pihak.

Karenan semua partai politik yang berada di Timor Leste memiliki potensi besar untuk melakukan konflik setiap kali ada pemilu. Entah itu pemilihan Presiden maupun pemilihan Legislatif, publik Timor-Leste tidak jarang harus menyaksikan adegan saling melukai, tauran

⁴¹ Koran Diario Edisi, 01 April 2011.

⁴² Wawancara dengan Wakil Presiden Parti Demokrasi (PD), Adriano Nasimento di Parlemen Nasional Dili, 23 Februari 2011.

⁴³ Wawancara dengan Wakil Presiden Partai Fretilin, Arseino Bano di Comite Central Fretilin (CCF) Dili, Rabu 02 Maret 2011.

antara masa, saling membunuh di antara para pendukung partai politik, perusakan gedung-gedung pemerintahan, pembakaran rumah-rumah warga dan berbagai bentuk anarki lainnya.

Sehingga dapat dipastikan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan mengundang kerawanan social dan keamanan. Dengan kemungkinan situasi tersebut maka dibutuhkan perencanaan penanggulangan dan perencanaan yang bersifat menyeluruh. Perencanaan yang bersifat menyeluruh ini juga berkaitan dengan seluruh elemen dan jaringan yang terlibat dalam upaya pengamanan.

Rekomendasi Fundasaun Mahein:

Rekomendasi FM 01

Karena itu, dalam rangka mengelola potensi konflik pemilihan umum maka, pertama, segenap lembaga terkait perlu membangun kesepakatan atau konsensus nasional dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik dan gejolak. Konsensus nasional itu tidak hanya melibatkan CNE, Pemerintah, Parlemen, partai-partai, PNTL, F-FDTL, dan Pengadilan Negri, tetapi juga tokoh-tokoh Adat, LSM, Gereja, pers, dan akademisi. Melalui kesepakatan nasional itu diharapkan dapat dihasilkan, misalnya, kode etik penyelenggaraan pemilihan umum, kode etik kampanye, komitmen siap kalah, dan seterusnya.

Rekomendasi FM 02

Meminta kepada para pimpinan Partai Politik dan komponen bangsa lainnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas, agar terwujud rasa nasionalisme yang tinggi.

Rekomendasi FM 03

Menghindari persaingan Elit Politik yang semakin tajam melalui cara-cara yang tidak etis (eksploitasi masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan), seperti pembunuhan karakter, pemaksaan kehendak maupun pengerahan massa yang tidak terkontrol.

Rekomendasi FM 04

PNTL mesti meningkatkan strategi penanganan konflik, dengan mengambil langkah-langkah strategis, agar konflik tersebut tidak menimbulkan instabilitas nasional.

Rekomendasi FM 05

Meminta kepada Istitusi PNTL untuk meningkatkan pengawasan dan penambahan personil aparat keamanan, dengan tujuan untuk mengantisipasi timbulnya konflik khususnya di daerah rawan konflik seperti Dili, Likisa, Ermera, Baucau, Lospalos dan Viqueque.

Daftar Pustakan

Buku dan Majalah

Undang-Undang Dasar Republik Demokrasi Timor Leste, tahun 2002.

TLALVA, Nota Informasaun, Violensia Armada Iha Timor Leste, No. 3 Juni 2009.

Surat Kabar

Koran Timor Post Edisi, Selasa 05 April 2011.

Koran Timor Post, Edisi Selasa, 18 Maret 2011.

Koran Timor Post, Edisi Rabu, 16 Maret 2011.

Koran Timor Post Edisi, Kamis, 06 April 2011.

Koran Diario Nasional, Edisi Jum`at, 16 Juli 2010.

Koran Diario Edisi, 28 Maret 2011.

Koran Diario Edisi, 01 April 2011.

Koran Diario Edisi, 28 Maret 2011.

Koran Diario Edisi, 04 Maret 2011.

Koran Diario, Edisi 09 Februari 2011.

Koran Diario Edisi, 08 Maret 2011.

Koran Suara Timor Lorosae, Edisi 05 April 2011

Koran Suara Timor Lorosae Edisi, 25 Februari 2011.

Koran Suara Timor Lorosae, Edisi 04 Maret 2011.

Koran Suara Timor Lorosae, Edisi Kamis, 17 Maret 2011.

Koran Dili Post, Edisi IV/15 Maret 2011.

Koran Dili Post, Edisi VI/ 22 Maret 2011/ Tinan 1.

Koran Kroat, Edisi Rabu, 02 Maret 2011.

Wawancara

Wawancara dengan Wakil Presiden Parti Demokrasi (PD), Adriano Nasimento di Parlemen Nasional Dili, 23 Februari 2011.

Wawancara dengan Wakil Presiden Partai Fretilin, Arseino Bano di Komite Central Fretilin (CCF) Dili, Rabu 02 Maret 2011

Wawancara dengan Presiden PUN (Partidu Unidade Nasional/Partai Persatuan Nasional) di Parlemen Nasional di Dili, 28 Februari 2011.

Wawancara dengan Renan Selak wakil Partai UNDERTIM di Parlamen Nasional, di Dili, 03 Februari 2011.

Wawancara dengan Rui Vianan Direktur Yayasan HAK, di Farol Dili, 15 Maret 2011.

Wawancara dengan Presiden PUN (Partidu Unidade Nasional/Partai Persatuan Nasional) di Parlamen Nasional di Dili, 28 Februari 2011.

Internet

<http://fundasaunmahein.wordpress.com/2011/04/12/dezempregu-biban-ida-kria-instabilidade-ih-timor-leste/>

<http://fundasaunmahein.wordpress.com/2011/02/17/untas-rendefoti-lima/>

<http://www.cjitl.org/cjitl-haleu-distritu/cjitl-same/278-udt-oferece-kadeira-101-ba-igreja-missionario-datina-same>

<http://www.cjitl.org/cjitl-haleu-distritu/cjitl-same/277--udt-oferece-semente-saka-50-ba-parokia-same>

<http://sholahuddinmz.multiply.com/journal/item/3>

<http://timordobenfurak.blogspot.com/2011/03/rejistu-ba-militantescrnt-125-mil-ona.html>